



TATKALA PARTAI TERUSIK USULAN KPK

Jabatan Ketum Dibatasi 2 Periode hingga Syarat Nyapres



Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar jabatan ketua umum partai maksimal dua periode dan mewajibkan jalur kaderisasi bagi calon presiden mengusik dapur politik. Komisi anti-rasuah menegaskan, langkah itu untuk memutus mata rantai oligarki. Dengan memaksa regenerasi, diharapkan bisa menutup pintu masuk transaksi politik yang kerap berulang di lingkaran sempit. Reaksi partai politik (parpol) pun langsung mencuat dengan mayoritas bernada kontra. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menuding KPK kebablasan karena mencampuri urusan internal. NasDem memilih meredam, menyebut persoalan ini tak sesederhana rumusan lembaga anti-korupsi itu. Partai Golkar memilih mengalihkan fokus ke kualitas demokrasi, sehingga durasi jabatan tak menjadi jaminan. Hanya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang melihat celah manfaat, khususnya dalam penataan kaderisasi. **BACA HAL 11...**

REKOMENDASI KPK KE PARTAI POLITIK

Pendidikan Politik

- o Wajib laporan kegiatan pendidikan politik
- o Memuat: kegiatan, peserta, tujuan, output
- o Terintegrasi dengan dana bantuan pemerintah

Pendidikan Politik

- o Jenjang kader: muda – madya – utama
- o Jadi syarat pencalonan di pemilu:
 - Muda → DPRD kab/kota
 - Madya → DPRD provinsi
 - Utama → DPR RI
- o Minimal 2 tahun jadi kader sebelum maju pemilu
- o Capres/kepala daerah wajib dari jalur kaderisasi



Sumber:
Berbagai Sumber
Diolah

MASALAH UTAMA YANG DITEMUKAN:

- Belum ada roadmap pendidikan politik
- Kaderisasi belum terstandar & terintegrasi
- Sistem pelaporan keuangan belum memadai
- Pengawasan dalam UU Partai Politik belum jelas

Jabatan Ketua Umum

- o Dibatasi maksimal 2 periode
- o Untuk menjaga regenerasi & kaderisasi

Keuangan Partai

- o Hapus sumbangan dari perusahaan
- o Semua sumbangan dicatat sebagai perseorangan

Pengawasan & Regulasi

- o Revisi UU Partai Politik (Pasal 29 & 34)
- o Perjelas mekanisme pengawasan partai
- o Standarisasi laporan kaderisasi oleh pemerintah

BULOG CETAK REKOR, STOK BERAS TEMBUS 5 JUTA TON

Cadangan beras pemerintah menembus batas psikologis baru. Perum Bulog mencatat stok lebih dari 5 juta ton. Angka yang untuk pertama kalinya tercapai dalam sejarah pengelolaan pangan nasional. Capaian ini diklaim sebagai penyangga utama stabilitas saat fluktuasi harga dan krisis global mengancam.

Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan capaian tersebut bukan sekadar statistik. "Alhamdulillah per pagi ini, Kamis tanggal 23 April 2026 stok beras yang ada di gudang BULOG



Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani saat mengecek gudang beras Bulog di JDP Karawang 1 Logistic Park, Jawa Barat.

menembus angka 5.000.198 ton. Pencapaian 5 juta ton ini adalah wujud komitmen BULOG dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras. Ini juga menjadi fondasi kuat untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan, sekaligus memastikan

masyarakat tetap memperoleh akses pangan yang cukup dan terjangkau," ujarnya, Kamis (23/4/2026).

Angka itu muncul di tengah inspeksi mendadak Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, ke gudang Bulog di Karawang. Melihat langsung

tumpukan beras yang memenuhi gudang, Amran memberi apresiasi. "Terima kasih Pak Dirut BULOG dan jajarannya yang sudah bekerja keras hingga stok cadangan beras pemerintah bisa mencapai 5 juta ton pada pagi ini," katanya.

Di balik capaian tersebut, Bulog menyebut ada kerja kolektif yang menopang, yaitu penyerapan gabah petani dalam negeri, koordinasi lintas sektor, hingga ekspansi infrastruktur penyimpanan. Saat ini, jaringan BULOG mencakup lebih dari 1.500 gudang milik sendiri dan lebih dari 1.200 gudang mitra yang tersebar di berbagai wilayah.

Cadangan sebesar itu menempatkan BULOG bukan sekadar operator logistik, melainkan instrumen strategis negara. Stok beras diproyeksikan menjadi alat untuk meredam gejolak harga, mengantisipasi kondisi darurat, sekaligus menopang program bantuan pangan.

Namun, di balik optimisme itu, angka 5 juta ton juga menjadi ujian soal seberapa efektif distribusi dapat menjangkau pasar dan masyarakat, serta sejauh mana cadangan tersebut benar-benar mampu menjaga keterjangkauan harga di lapangan.

Tambah Gudang di 3 Provinsi

Lonjakan produksi beras mulai menguji kapasitas penyimpanan negara. Perum Bulog bergerak menambah gudang, terutama di tiga provinsi kunci yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyebut ekspansi dilakukan untuk mengejar kebutuhan yang terus membesar. Skema yang ditempuh masih bersifat sementara yaitu menyewa gudang sambil menunggu pembangunan permanen.

"Sedang proses. Untuk gudang-gudang besar seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sudah mulai berjalan untuk mengejar tambahan kapasitas sekitar 1 juta ton," ujarnya.

Tekanan terhadap kapasitas simpan datang dari peningkatan produksi yang melampaui proyeksi. BULOG sebelumnya hanya mencadangkan ruang sekitar 2 juta ton. Namun, lonjakan panen memaksa penambahan kapasitas baru sekitar 1 juta ton melalui sewa gudang. "Kalau sewa gudang ini terus bertambah. Kami sebelumnya mencadangkan 2 juta ton. Karena produksi meningkat cepat, kami tambah lagi sekitar 1 juta ton untuk sewa gudang," kata Rizal.

Situasi ini tak lepas dari stok beras nasional yang telah menembus 5 juta ton, angka yang didorong peningkatan produksi, termasuk dari program pompanisasi di musim kemarau. Di satu sisi, stok melimpah menjadi bantalan ketahanan pangan. Di sisi lain, ia memunculkan persoalan klasik: keterbatasan ruang simpan. (wid,rls,ktn,dtc/dya)

STOK BERAS RI

2026

6 Juta Ton

2025

3.7 Juta Ton

2024

1.8 Juta Ton

2023

0.8 Juta Ton

2022

0.3 Juta Ton



DI TENGAH klaim stok beras melimpah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman justru membuka praktik beras 'premium' yang tak sepremium labelnya.

Dari hasil pemeriksaan laboratorium, pemerintah menemukan beras yang dijual sebagai kualitas premium ternyata memiliki tingkat pecahan jauh di atas standar. Jika ambang batas premium sekitar 14 persen, beras yang beredar justru mencatat angka 34 persen hingga 59 persen. Selisih kualitas itu berujung pada selisih harga yang mencolok.

Dengan kondisi tersebut, harga semestinya berada di kisaran Rp8.000-Rp12.000 per kilogram. Namun di pasar, beras yang sama dilepas hingga Rp17.000 per kilogram.

"Pak, yang kemarin itu, oplos,

Mentan Amran Bongkar Kecurangan Beras Premium

oplos, oplos. Bukan oplos, nyolong. Ini aku periksa di lab. Ini beras semuanya yang middleman tadi, ini kalau premium, itu 14% pecahannya. Yang kita tangkap itu 59%, 34%. Artinya harga Rp 8.000 dijual Rp 17.000," kata Amran saat inspeksi di gudang Bulog, Karawang, Kamis (23/4/2026).

Permainan kualitas yang dibungkus label premium ini, menurut Amran, bukan sekadar pelanggaran etik dagang, melainkan berpotensi merugikan negara dalam skala besar. Dengan asumsi konsumsi 2 juta ton, selisih harga Rp5.000 per kilogram saja bisa menghasilkan kerugian hingga Rp10 triliun.

"Kalau Rp 12.000 saja, aku hitung Rp 5.000. Kalau 2 juta ton Rp 10 triliun. Sehingga saya total semua yang dijual, itu Rp 100.000.000," ujarnya.

Pemerintah, kata dia, akan terus menindak pelaku melalui koordinasi dengan Satgas Pangan. Sejumlah pihak disebut telah diamankan dan diproses hukum. Di tengah kritik atas langkah represif itu, Amran memilih

mengambil posisi tegas.

"Pertanyaan saya, Pak, yang mana kejam? Yang mana kejam, yang memberantas 100 orang atau 1.000 orang, atau mafia lewat, koruptor. Ini lewat, aku dor satu-satu bersama Satgas Pangan. Kira-kira yang kejam ini, ini menyusahkan 256.000.000 orang. Yang mana yang kejam? Yang ke j a m y a n g m e n y u s a h k a n 256.000.000 orang," tuturnya.

Di tengah isu kenaikan biaya logistik dan kemasan plastik, Andi Amran Sulaiman menegaskan satu hal yaitu harga beras belum bergerak.

Pemerintah, kata Amran, masih mengandalkan instrumen lama--harga eceran tertinggi (HET) dan beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)--untuk menahan gejolak pasar. Ia meminta pedagang tidak bermain di atas batas.

"Ada HET (harga eceran tertinggi). Jadi ada harga eceran tertinggi. Kami minta seluruh teman-teman pedagang jangan menaikkan harga di atas HET," ujarnya. (wid,ist,kum/dya)

DPR TOLAK WACANA DENDA E-KTP HILANG

Wacana denda bagi warga yang kehilangan KTP elektronik mulai menuai kritik di parlemen. DPR menilai usulan itu berpotensi membebani kelompok rentan dan perlu dikaji ulang secara serius.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Ali Ahmad, mengatakan KTP bukan sekadar kartu identitas administratif, melainkan akses utama warga terhadap hak-hak dasar. "KTP adalah pintu masuk bagi warga negara untuk



Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya

KONTROVERSI TERKAIT E-KTP (KTP ELEKTRONIK) DI INDONESIA

1. Kontroversi Kebijakan (April 2026)

- Denda KTP hilang diprotes karena membebani warga saat sistem digital belum siap
- Chip e-KTP dikritik tak dimanfaatkan maksimal, warga masih diminta fotokopi dokumen

2. Skandal Korupsi Megaproyek

- Kerugian negara sekitar Rp2,3 triliun dari total Rp5,9 triliun
- Menyeret pejabat tinggi termasuk Setya Novanto
- Menurunkan kepercayaan publik dan menghambat e-Government

3. Masalah Teknis & Distribusi

- IKD masih tahap pengembangan, belum sepenuhnya siap
- Kasus e-KTP tercecer picu risiko penyalahgunaan data
- Kendala teknis: chip tak terbaca & alat pemindai terbatas



mendapatkan hak dasarnya. Jangan sampai kebijakan denda ini justru menjadi hambatan bagi masyarakat, terutama warga tidak mampu, untuk mengakses layanan publik seperti kesehatan atau bantuan sosial," ujarnya, Kamis (23/4/2026).

Ia memahami logika di balik wacana tersebut, yakni mendorong tanggung jawab warga sekaligus menekan beban anggaran negara

untuk pencetakan blangko. Namun, Ali mengingatkan, pendekatan sanksi finansial berisiko kontraproduktif terhadap kewajiban negara dalam memberikan pelayanan publik.

Persoalan lain, kata dia, terletak pada sebab kehilangan dokumen itu sendiri. Pemerintah diminta tidak menyamaratakan semua kasus. "Pemerintah harus bisa membedakan mana yang murni kelalaian dan mana

yang akibat musibah. Jika warga yang menjadi korban pencurian atau bencana masih dibebani denda, ini tentu sangat tidak adil dan akan menyakiti rasa keadilan masyarakat," katanya.

Ali juga menyoroti potensi efek samping kebijakan tersebut: terbukanya ruang praktik pungutan liar di tingkat layanan dasar. Ia melihat kecenderungan masyarakat mencari jalan pintas untuk menghindari prosedur resmi. "Peluang ini besar terjadi, karena masyarakat tidak ingin ribet bayar denda ke kas negara, lalu memakai jalan pintas dengan oknum kependudukan," ujarnya.

Sebagai jalan keluar, ia mendorong pemerintah mempercepat penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Digitalisasi, menurutnya, jauh lebih efisien ketimbang menambah beban melalui sanksi. "Jika identitas digital sudah merata dan bisa diterima di seluruh sektor perbankan maupun layanan publik, masyarakat tidak perlu lagi khawatir kehilangan kartu fisik. Ini akan jauh lebih efisien bagi negara dan memudahkan warga," pungkasnya.

Sementara, Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, memilih menarik isu ini ke persoalan yang lebih mendasar: pembenahan sistem administrasi kependudukan secara menyeluruh.

Alih-alih menambah beban sanksi, Doli mendorong penerapan single identity number—satu nomor identitas digital untuk setiap warga negara. Dengan skema itu, persoalan KTP hilang dinilai akan kehilangan relevansinya.

Gagasan denda sendiri mencuat dalam rencana revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), yang tengah dibahas Kementerian Dalam Negeri bersama Komisi II DPR. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, beralasan masih banyak warga yang abai menjaga dokumen kependudukan.¹

Namun bagi Doli, fokus kebijakan semestinya tidak berhenti pada soal kehilangan kartu fisik. Ia menekankan pentingnya integrasi data kependudukan yang kini juga tengah dibahas melalui rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia. Sinkronisasi regulasi, menurutnya, menjadi kunci.

"Selanjutnya, UU itu harus melahirkan sistem yang juga bisa menyatukan semua data diri menjadi satu angka identitas saja. Kita sudah harus bisa menerapkan sistem single identity number untuk setiap warga negara Indonesia," ujarnya. (wid,rls,ant/dya)

Bima Arya: Ganti Biaya Cetak

Bima kepada wartawan, Kamis (23/4/2026).

Penjelasan itu sekaligus meredakan kesan bahwa negara tengah menambah beban baru bagi masyarakat. Menurut Bima, logika kebijakan ini sederhana: mendorong tanggung jawab warga sekaligus menutup kebocoran biaya negara akibat pencetakan ulang yang terus berulang.

Ia mengungkapkan, jumlah warga yang mengurus penggantian KTP karena hilang terbilang besar. Di sisi lain, biaya produksi tetap harus ditanggung negara. "Saya mendapati laporan bahwa jumlah warga yang mencetak karena KTP-nya hilang itu banyak sekali. Sedangkan biaya untuk mencetaknya itu Rp 10.000. Jadi kalau misalnya ada 1.500.000 (orang) saja warga yang hilang seluruh Indonesia, maka paling enggak akan keluar 15 miliar (rupiah) gitu untuk itu," ujarnya.

Meski demikian, Bima menegaskan wacana tersebut belum menjadi keputusan final. Ia bahkan menyebut gagasan itu juga berkembang dalam diskursus

bersama DPR. "Ya, jadi ada biayanya gitu kalau cetak kedua supaya warga bisa menjaga itu. Ya kalau tidak salah SIM juga kalau hilang cetak bayar juga gitu. Nah, jadi ini harus dipahami konteksnya secara keseluruhan," ucapnya.

Di saat yang sama, pemerintah mengklaim tengah menggeser arah kebijakan ke digitalisasi identitas. Penguatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) disebut menjadi prioritas untuk mengurangi ketergantungan pada kartu fisik.

"Yang pertama, harus dipahami bahwa ini kita terus bekerja keras untuk mengaktifkan IKD agar bisa menjadi satu identitas yang bisa digunakan untuk semua kebutuhan," kata Bima.

Pembahasan administrasi kependudukan kembali mengemuka di Senayan. Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, memaparkan sejumlah titik lemah sekaligus arah pembenahan sistem adminduk nasional. Dari regulasi yang dianggap usang hingga ambisi besar integrasi data. (wid,rls,kum/dya)

ISTILAH 'denda' dalam polemik kehilangan KTP elektronik mulai diluruskan pemerintah. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan, yang dimaksud bukan sanksi, melainkan biaya cetak ulang bagi warga yang kehilangan kartu identitasnya.

"Yang menjadi masalah, yang dikritik itu adalah kata denda, ya kan, denda. Nah, sebetulnya yang dimaksud adalah biaya cetak baru. Jadi yang pertama itu kan gratis, tapi kalau cetak baru itu dikenakan tarif, gitu kira-kira. Biaya cetak baru," kata

KECIPRATAN UANG PUNGLI, 19 STAF ESDM JATIM KEMBALIKAN RP 707 JUTA KE KEJATI

Kejaksanaan Tinggi (Kejati) Jatim kembali mengeledah Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim pada Senin (20/4/2026). Pengeledahan ini terkait perkembangan kasus korupsi pungli di lingkungan Dinas ESDM Jatim. Perkembangan terbaru, 19 staf di bidang pertambangan mengembalikan uang diduga hasil pungli kepada Kejati.

Aspidus Kejati Jatim, Wagiy, mengatakan penyidik menemukan sejumlah berkas dokumen permohonan izin tambang yang terindikasi sengaja dipisahkan.

"Dan kemarin kita sudah jelaskan ke teman-teman bagaimana modus dari pemerasan maupun pungli ini bahwa syaratnya sudah lengkap tapi izinnya tidak keluar. Sengaja ditahan. Ya, antara lain seperti itu. Juga catatan pembagian keuangan," kata Wagiy di Kantor Kejati Jatim, Kamis (23/4/2026).

Selain itu, penyidik menemukan catatan pembagian keuangan dengan tulisan petunjuk pimpinan yang tidak sah di ruang Kepala Dinas dan Kabid



Sebanyak 19 pegawai Dinas Energi Sumber Daya Mineral (DESDM) berbondong-bondong ke kantor Kejaksanaan Jawa Timur, Kamis (23/4/2026).ist

Pertambangan ESDM Jatim.

"Nah, itu yang kita temukan pada saat pengeledahan pada tanggal 20 April 2026," ucapnya.

Kemudian, kata Wagiy, ditemukan juga aliran uang pungli

perizinan tambang yang secara rutin dibagikan kepada 19 staf di bidang pertambangan atas petunjuk Kepala Dinas ESDM Jatim.

"Jadi ada ketua kelompok perizinan total sekitar 19 orang ya

dari tersangka OS selaku Kabid Pertambangan atas petunjuk dari tersangka AM selaku kepala dinas," katanya.

Wagiy menyampaikan, pembagian uang tersebut dilakukan secara rutin setiap akhir bulan selama kurang lebih dua tahun terakhir.

"Dengan jumlah bervariasi antara Rp 750 ribu sampai dengan Rp 2,5 juta tergantung status. Statusnya maksudnya pegawai, honor, jabatan ya, itu tergantung statusnya dan beban pekerjaannya yang dilakukan," ujar dia.

Hingga hari ini, kata dia, 19 staf tersebut mulai mengembalikan hasil korupsi pungli yang mereka terima selama ini.

"Hari ini juga sebut telah bertahap dan telah melakukan kemudian mereka nanti ke kantor kita mengembalikan. Kemudian telah kita lakukan penyitaan. Dengan jumlah total uang pungli yang terkumpul sementara ini adalah sebesar Rp 707 juta. Jadi per tadi pagi beramai-ramai dari yang 19 orang tadi sudah mengembalikan dan jumlah totalnya yang kita terima Rp 707 juta," kata dia.

Penyidik juga menyita satu unit mobil Toyota Fortuner VRZ 4x2 AT warna hitam metalik tahun 2022 dengan pelat nomor L 1275 ABD milik tersangka Kepala Bidang Pertambangan ESDM Jatim, Oni Setiawan, di rumahnya.

"Yang diduga kalau kita lihat perolehannya itu berasal dari pendapatan yang tidak sah ya. Tentu dari hasil pungli-pungli tersebut," ucap dia.

Wagiy mengatakan, 19 staf itu merupakan pegawai negeri sipil (PNS) hingga honorer di bidang pertambangan ESDM Jatim. Mereka kini berstatus sebagai saksi.

"Statusnya saksi. Ada PNS, ada juga honorer. Makanya kita tadi sampaikan bahwa biasanya besarnya itu sesuai status dan beban kerjanya," katanya.

Di tengah pengembangan perkara yang belum rampung, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mulai mencium aroma lain. Diungkap afs upaya menghambat penyidikan dugaan pungutan liar di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Timur. Peringatan pun dilontarkan, keras dan terbuka—siapa pun diminta tidak bermain-main dengan proses hukum. (wid,ist,kum/dya)

HARTA ARIS MUKIYONO

(LHKPN Maret 2025)

TOTAL ASET

RP 3,93 MILIAR

(Tanpa Utang)



Tanah dan bangunan

Rp 3,1 miliar



Kendaraan

Rp 330 juta



Kas dan setara kas

Rp 250 juta



Surat Berharga

Rp 100 juta

Respon Pemerintah Jatim: Janji Kooperatif

Dinas ESDM Jatim buka suara. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas ESDM Jatim, Aftabuddin Rijaluzzaman mendukung segala upaya Kejati Jatim untuk bersih-bersih di Dinas ESDM Jatim.

"Kami tetap kooperatif dan percaya sepenuhnya pada tim Kejati dalam penanganan kasus ini," kata Aftabuddin kepada detikJatim, Kamis (23/4/2026).

Aftabuddin memastikan dirinya akan terus memperbaiki internal ESDM. Ia juga berkomitmen memberi pelayanan maksimal ke warga.

"Kami akan terus konsolidasi. Kami percaya sepenuhnya pada tim Kejati dalam penanganan kasus ini," tandasnya.

Berdasarkan hasil pengeledahan di kantor Dinas ESDM pada 20 April 2026, penyidik menemukan dokumen permohonan izin yang sengaja ditahan meskipun syaratnya sudah lengkap.

"Modusnya adalah izin tidak dikeluarkan meski syarat lengkap, sengaja ditahan. Kami juga

menemukan catatan pembagian keuangan dan disposisi pimpinan yang merupakan perintah tidak sah di ruang Kepala Dinas dan Kabid Pertambangan," ujar Wagiy.

Penyidikan mengungkap bahwa uang pungli tersebut dibagikan kepada 19 orang staf, mulai dari pegawai tetap hingga honorer, dengan besaran Rp 750 ribu ke atas per bulannya tergantung jabatan dan beban kerja.

Merespons penyidikan ini, para staf tersebut secara proaktif mengembalikan uang yang telah mereka terima dengan total Rp 707.000.000.

Saat ini, status pegawai masih sebagai saksi, namun penyidik akan terus melihat perkembangan fakta hukum di persidangan.

Selain uang tunai, penyidik juga menyita satu unit mobil Toyota Fortuner VRZ 4x2 AT warna hitam metalik tahun 2022 (Nopol L 1275 ABD) milik tersangka OS. Mobil tersebut diduga kuat dibeli dari hasil pendapatan tidak sah atau pungli perizinan. (wid,ist/h)



PENYIDIKAN kasus dugaan korupsi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur memasuki babak baru. Hingga Kamis (23/4/2026), tercatat sebanyak 19 staf pertambangan telah mengembalikan uang hasil pungutan liar (pungli) mencapai Rp 707 juta.

GELOMBANG PERTAMA: 6.000 JEMAAH HAJI INDONESIA TIBA DI MADINAH

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) melaporkan jamaah calon haji Indonesia gelombang pertama yang sudah tiba Madinah, Arab Saudi, hampir 6.000 orang setelah dimulainya misi haji 1447 Hijriah pada 22 April 2026. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah Yusron B. Ambary meminta jamaah yang telah tiba untuk membatasi pergerakan dan mengurangi aktivitas luar ruangan yang tidak perlu demi menjaga kondisi kesehatan.

Yusron menjelaskan sebagian besar peserta haji Indonesia merupakan lanjut usia (lansia), maka mereka diingatkan agar tidak memaksakan diri dalam beribadah apabila kondisi tubuh sedang tidak fit. "Jamaah diharapkan selalu menjaga kesehatan dan tidak memaksakan diri, mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang," ujar Yusron dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Kondisi fisik yang prima, lanjut dia, sangat diperlukan agar jamaah dapat menjalani puncak ibadah haji pada Mei mendatang dengan baik.

Sementara itu Kepala Daerah Kerja (Daker) Madinah Khalilurrahman juga mengimbau jamaah untuk mewaspada perubahan cuaca di Madinah dengan menggunakan alat pelindung diri

"Jamaah diimbau menggunakan



Seorang calon haji Embarkasi Padang berpamitan dengan anaknya saat tiba di Asrama Haji Tabing, Padang, Sumatera Barat, Kamis (23/4/2026). Ist

payung, kacamata, masker, serta alas kaki yang nyaman. Selain itu penting untuk rutin minum air, sekitar dua hingga tiga teguk setiap 20-30 menit," katanya.

Ia menyarankan penggunaan tabir surya (sunscreen) dan pelembap bibir guna menjaga kondisi tubuh dari paparan cuaca panas.

Pada hari pertama kedatangan,

JADWAL LENGKAP PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI 2026

- 21 April 2026: Calon jamaah haji mulai masuk asrama haji.
- 22 April - 6 Mei 2026: Pemberangkatan gelombang 1 dari Tanah Air ke Madinah.
- 7 - 21 Mei 2026: Pemberangkatan gelombang 2 dari Tanah Air ke Jeddah.
- 25 Mei 2026: Pemberangkatan calon jamaah haji dari Makkah ke Arafah.
- 26 Mei 2026: Wukuf di Arafah (puncak haji).
- 27 Mei 2026: Perayaan Iduladha 1447 H.
- 28-30 Mei 2026: Hari Tasyrik 1-3.
- 1-15 Juni 2026: Pemulangan jamaah haji gelombang 1 melalui Jeddah.
- 16 Juni 2026: Awal pemulangan jamaah haji gelombang 2 dari Madinah ke Tanah Air.
- 21 Juni 2026: Akhir pemberangkatan calon jamaah haji gelombang 2 dari Makkah ke Madinah.
- 30 Juni 2026: Akhir pemulangan jamaah haji gelombang 2 dari Madinah ke Tanah Air.
- 1 Juli 2026: Akhir kedatangan seluruh jamaah haji ke Tanah Air.



hampir 6.000 orang peserta haji Indonesia mendarat melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah.

Berdasarkan data sebanyak 5.997 orang yang tergabung dalam 15 kelompok terbang (kloter) tiba secara bertahap hingga Rabu (22/4) pukul 22.55 Waktu Arab Saudi.

Jamaah tersebut berasal dari berbagai embarkasi di Indonesia, antara lain Yogyakarta, Jakarta, Medan, Lombok, Solo, dan Makassar.

Arab Saudi kembali menghadirkan inovasi digital untuk meningkatkan kenyamanan ibadah haji di Masjidil Haram, Makkah. Otoritas setempat meluncurkan layanan terbaru yang memungkinkan jamaah memantau tingkat kepadatan secara langsung di area tawaf dan sa'i. (eid,rls,kum/dya)

Hotelnnya Terdekat ke Masjid Nabawi, Hanya Berjarak 50 M



Keluarga dan kerabat tampak berbondong-bondong melepas keberangkatan para jamaah menuju Tanah Suci. Ist

Kepala Seksi Akomodasi Daerah Kerja (Daker) Madinah Dr Zaenal Muttaqin, menjelaskan total terdapat 118 hotel yang telah disiapkan untuk melayani jamaah. Hotel-hotel tersebut tersebar di tiga wilayah utama yang dikoordinasikan oleh lima sektor.

"Kawasan Markaziyah dibagi menjadi tiga wilayah yakni kawasan Syamaliah, Ghorbiah dan Janubiah," ucapnya dikutip Kamis (23/4/2026).

Kawasan Syamaliah meliputi Sektor 1 (22 hotel) dan Sektor 2 (23 hotel). Kawasan Ghorbiah dikelola Sektor 3 (24 hotel) dan Sektor 4 (26 hotel). Sedangkan Kawasan Janubiah dikoordinir Sektor 5 (22 hotel).

"Kawasan ini menjadi incaran hampir semua negara. Alhamdulillah, Indonesia berhasil mendapatkan lokasi tersebut sehingga jaraknya sangat dekat dengan Masjid Nabawi," ujar Zaenal.

Lokasi hotel jamaah Indonesia tahun ini tergolong sangat istimewa. Jika dirata-ratakan, jarak 118 hotel tersebut hanya berkisar 500 meter dari Masjid Nabawi.

Kondisi ini tentu memudahkan jamaah untuk menjalankan ibadah sunah, termasuk melaksanakan Arba'in atau salat berjamaah 40 waktu berturut-turut selama sembilan hari masa tinggal di Madinah.

Meskipun lokasi hotel sangat strategis, Zaenal memberikan catatan terkait pengaturan kamar. Hal ini karena kapasitas tiap hotel berbeda, sehingga ada kemungkinan jamaah dalam satu kelompok terbang (kloter) harus terpisah di hotel yang berbeda.

"Kami berupaya agar meskipun terpaksa pisah hotel, jamaah tetap dalam satu regu atau rombongan dan lokasinya berdekatan. Ini dilakukan agar tidak ada sisa kamar yang kosong, karena bisa menimbulkan kerugian negara. Kami mohon kearifan jamaah untuk memahami kondisi ini," jelasnya.

Fasilitas yang disediakan pun cukup apik. Zaenal menyebutkan ada jamaah reguler yang memungkinkan mendapatkan fasilitas setara hotel bintang empat hingga bintang lima. (wid,ist,kum/dya)

JEMAAH haji asal Indonesia yang tengah berada di Madinah boleh berbahagia. Hotel yang ditempati para jamaah tahun ini, sangat dekat dengan Masjid Nabawi. Paling dekat berjarak 50 meter, sementara terjauh 700 meter saja.

Dengan begitu, jamaah dapat ke Masjid Nabawi hanya dengan berjalan kaki. Pada musim haji tahun ini, seluruh akomodasi jamaah dipastikan berada di kawasan strategis Markaziyah atau berada di dalam area Ring Road, yang merupakan kawasan paling dekat dengan Masjid Nabawi.

DPRD PASTIKAN PEMERASAN BPJS MALANG HANYA SURAT KALENG

MALANG - DPRD Kabupaten Malang akhirnya memberikan klarifikasi terkait dugaan pemerasan yang menyeret BPJS Kesehatan Cabang Malang terhadap sejumlah fasilitas kesehatan (faskes). Legislatif memastikan isu tersebut tidak terbukti dan hanya berasal dari surat kaleng.

"Kami sudah bertemu dengan para stakeholder. Karena sebelumnya di masyarakat juga ramai beredar klinik dimintai emas oleh BPJS agar kepesertaannya tetap berlanjut. Di situ kami klarifikasi, pelapornya ada tidak, ternyata tidak ada," ujar Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zia'ul Haq, dikutip pada Kamis (23/4/2026).

Diketahui, kepastian tersebut merupakan kesimpulan dari rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar oleh DPRD Kabupaten Malang pada Selasa (21/4/2026).

Menurut Zia, RDP tersebut menghadirkan pihak dari BPJS Kesehatan Cabang Malang, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang, serta Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Indonesia (PKFI).

Sebelumnya, isu dugaan pemerasan ini mencuat dari sebuah surat aduan yang dikirimkan ke Direktorat BPJS Kesehatan Pusat dengan tembusan ke Bupati Malang dan DPRD Kabupaten Malang. Dalam surat tersebut disebutkan adanya dugaan permintaan tidak wajar, termasuk upeti berupa emas batangan.

Selain itu, dalam aduan yang sama juga mencuat dugaan permintaan fasilitas lain seperti tiket menonton balapan di Sirkuit Mandalika hingga akomodasi hotel berbintang yang dikaitkan dengan oknum tertentu di lingkungan BPJS Kesehatan Cabang Malang.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, sebelumnya mengakui pihaknya menerima surat pengaduan tersebut.

Namun, berdasarkan hasil klarifikasi dalam RDP menyimpulkan laporan tersebut tidak dapat diverifikasi kebenarannya secara materiil. "Kalau surat kaleng yang

beredar ini tidak bisa jadi bukti secara materiil," tegas Zia.

Ditambahkannya, sistem hukum di Indonesia menuntut adanya bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, baik bukti fisik maupun non-fisik, untuk membuktikan adanya tindak pidana.

"Sedangkan ini tidak ada, ini hanya surat kaleng yang kebenarannya tidak jelas," lanjutnya.

Meski demikian, DPRD Kabupaten Malang menilai kasus ini tetap menjadi perhatian penting sebagai peringatan bagi seluruh lembaga pelayanan publik, termasuk BPJS Kesehatan.

"Tetapi ini menjadi alarm bagi lembaga, termasuk BPJS. Tidak menutup kemungkinan ada surat-surat seperti ini lagi ke depan. Padahal



Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zia'ul Haq. (foto: Ist)

belum tentu benar secara materiil," kata Zia.

DPRD juga telah melakukan penelusuran terhadap pengirim surat aduan tersebut, namun tidak menemukan identitas yang jelas sehingga surat tersebut dikategorikan sebagai surat kaleng. (Santi/Dya)

PEMKOT MALANG PERCEPAT TANAM PADI ANTISIPASI ANCAMAN KEMARAU PANJANG

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melaksanakan gerakan percepatan tanam padi serentak di kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kamis (23/4/2026). (Santi/Lentera)



MALANG- Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mempercepat penanaman padi di sejumlah wilayah. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi musim kemarau panjang di tahun 2026 ini.

"Hari ini kami melaksanakan gerakan serentak percepatan menanam padi. Untuk di Mulyorejo ini ada sekitar 1,1 hektare yang

ditanami, dari total 10 hektare lahan sawah yang tersedia," ujar Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, Kamis (23/4/2026).

Dijelaskannya, masa panen padi diperkirakan berlangsung dalam waktu 112 hingga 115 hari atau kurang dari 4 bulan. Dengan pola tanam tersebut, petani di Kota Malang dapat melakukan panen hingga 2 kali dalam setahun.

Menurut Wahyu, percepatan tanam ini memiliki 2 tujuan utama.

Pertama, untuk mengantisipasi dampak musim kemarau panjang yang berpotensi mengganggu produksi pangan.

Kedua, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan lahan sawah agar tidak beralih fungsi. "Kami berharap dari gerakan seperti ini, stabilitas harga padi di Kota Malang juga tetap

terjaga sehingga daya beli masyarakat tetap terjangkau," imbuhnya.

Lebih lanjut, Wahyu menegaskan Pemkot Malang telah berkomitmen mengendalikan lahan sawah yang ada, termasuk memastikan tidak terjadi alih fungsi lahan secara masif.

Hal ini sejalan dengan regulasi dari Kementerian ATR/BPN yang mewajibkan pemerintah daerah menjaga lahan pertanian pangan berkelanjutan. "Jika tetap dipaksakan, maka proses perizinannya tidak akan ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat," tegasnya.

Di sisi lain, Wahyu menyebut total lahan sawah milik Pemerintah Kota Malang mencapai 18,5 hektare. Luasan tersebut belum termasuk lahan pertanian yang dimiliki masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang, Slamet Husnan, menjelaskan percepatan tanam dilakukan dengan memanfaatkan sisa musim hujan yang

masih berlangsung di musim pancaroba ini.

"Berdasarkan informasi BMKG, hingga akhir April 2026 wilayah Jawa Timur masih berpotensi mengalami hujan," jelasnya.

Slamet menambahkan, kondisi iklim di Jawa Timur juga dipengaruhi fenomena El Nino dengan kategori sedang, sehingga langkah percepatan tanam menjadi strategi untuk menghindari potensi gagal panen akibat kekeringan.

Dalam kegiatan tersebut, pemerintah juga memberikan dukungan berupa bantuan benih padi kepada petani. Varietas yang ditanam adalah Inpari 32 dan Inpari 45 yang dinilai sesuai dengan kondisi lahan di Kota Malang.

"Total benih yang disalurkan pada tahun anggaran 2026 mencapai 10.000 kilogram atau 10 ton. Harapannya, petani tidak lagi kesulitan dalam menyediakan benih untuk usaha taninya," ungkap Slamet. (Santi/Dya)

Dampak Gejolak Timur Tengah Makin Dalam MASKAPAI JERMAN HINGGA BELANDA PANGKAS 20.000 PENERBANGAN

Maskapai asal Jerman, Lufthansa, memangkas puluhan ribu penerbangan jarak pendek di tengah lonjakan harga bahan bakar jet (avtur). Kebijakan ini diambil ketika biaya operasional kian tertekan akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah.

Harga avtur dilaporkan melonjak lebih dari dua kali lipat sejak pecahnya konflik antara Amerika Serikat-Israel dan Iran. Situasi itu mengganggu produksi sekaligus distribusi bahan bakar di kawasan yang menjadi salah satu pusat pasokan global.

Lufthansa bukan pemain tunggal. Sejumlah maskapai lain, termasuk KLM dan Delta Air Lines, lebih dulu memangkas frekuensi penerbangan. Dampaknya merembet ke penumpang,



dengan harga tiket yang ikut terdorong naik.

Mengutip laporan BBC pada Kamis (23/4/2026), Lufthansa berencana mengurangi sekitar 20.000 penerbangan jarak pendek selama musim panas. Alasan utamanya adalah efisiensi operasional di tengah biaya bahan bakar yang membengkak.

Lonjakan harga ini tak lepas dari peran kilang minyak di Timur Tengah dalam rantai pasok global. Kilang Al-Zour di Kuwait, misalnya, disebut menyuplai sekitar 10 persen impor bahan bakar jet ke Eropa, menurut data Energy Intelligence.

Di sisi lain, International Energy Agency memperingatkan potensi

kekurangan avtur di Eropa dalam beberapa pekan mendatang. Meski begitu, pemerintah Inggris dan sejumlah maskapai menyatakan belum melihat gangguan pasokan yang signifikan sejauh ini.

Manajemen Lufthansa menegaskan, pengurangan rute di Eropa tidak serta-merta memutus akses penumpang ke jaringan global. Koneksi jarak jauh tetap dipertahankan. "Namun karena kenaikan harga bahan bakar jet, hal itu dicapai dengan cara yang jauh lebih efisien daripada sebelumnya," kata manajemen.

Efisiensi itu diperkirakan bisa menghemat sekitar 40.000 metrik ton bahan bakar jet. Kebijakan ini juga datang tak lama setelah Lufthansa mempercepat penutupan permanen layanan CityLine di Eropa.

Sebanyak 27 pesawat dari program tersebut telah dihentikan operasinya. Selain tekanan harga minyak, keputusan ini juga dipengaruhi konflik tenaga kerja yang menambah beban perusahaan.

Implementasi pengurangan sudah berjalan. Sekitar 120 penerbangan telah dipangkas sejak Selasa, termasuk rute Frankfurt menuju Polandia dan Norwegia. Situasi ini menandai babak baru tekanan di industri penerbangan Eropa, yang kini berhadapan dengan biaya energi yang tak lagi bersahabat.

Maskapai Belanda, KLM Royal Dutch Airlines, juga memangkas ratusan penerbangan di kawasan Eropa setelah harga bahan bakar jet (avtur) melonjak tajam. Kebijakan ini diambil sebagai langkah efisiensi, seiring sejumlah rute dinilai tak lagi menguntungkan.

Dalam pernyataan resminya, KLM menyebut beberapa rute sudah tak layak dijalankan. "Tidak layak secara finansial untuk dioperasikan," demikian keterangan perusahaan, Kamis (23/4/2026).

Pembatalan mencakup lebih dari 150 penerbangan, setara sekitar 80 perjalanan pulang-pergi dari Bandara Schiphol, Amsterdam. Meski begitu, dampaknya disebut relatif kecil—kurang dari 1 persen dari total operasi penerbangan Eropa maskapai tersebut. Lonjakan harga avtur global disebut berada di kisaran 50 hingga 83 persen dalam waktu singkat. Kenaikan ini dipicu ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang mengguncang pasar energi dunia dan menekan biaya operasional maskapai.

KLM menegaskan, langkah pembatalan ini bukan disebabkan kelangkaan bahan bakar, melainkan strategi pengendalian biaya di tengah tekanan harga energi. Penumpang yang terdampak akan dialihkan ke jadwal penerbangan lain yang masih tersedia.

Selain itu, maskapai juga sempat menanggukkan sejumlah rute ke kawasan Timur Tengah sebagai bagian dari penyesuaian operasional. (tin,bbc,ist/dya)

DATA HARGA AVTUR DI BANDARA SOEKARNO-HATTA (2022-2026)

April 2026

23.551,08

April 2025

12.921,93

April 2024

13.767,81

April 2023

13.049,93

April 2022

14.608,13

Rupiah per liter

Iran Terima Bayaran Pertama dari Pungutan di Selat Hormuz

ujarnya pada Kamis (23/4/2026), seperti dikutip media Iran dan kantor berita Tasnim. Meski demikian, pemerintah belum mengungkap besaran dana yang terkumpul maupun skema tarif yang diberlakukan kepada kapal-kapal yang melintas.

Selat Hormuz sendiri merupakan jalur strategis yang dalam kondisi normal dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dan gas global. Namun sejak pecahnya konflik pada 28 Februari, kawasan ini berubah menjadi titik panas. Iran dilaporkan hanya mengizinkan sebagian kecil kapal untuk melintas, memicu gangguan besar terhadap arus perdagangan energi dan komoditas dunia.

Rencana penerapan tarif ini sempat memicu perdebatan di dalam negeri Iran. Parlemen melalui komisi keamanan telah menyetujui usulan tersebut sejak 30 Maret, meski belum ada kejelasan apakah telah disahkan lewat pemungutan suara final.

Pejabat Iran sebelumnya juga telah memberi sinyal keras soal perubahan situasi di selat tersebut.

Mereka menyebut lalu lintas maritim "tidak akan kembali ke kondisi sebelum perang".

Di tengah ketegangan, tarik-ulur dengan Amerika Serikat terus berlangsung. Presiden Donald Trump menekan Iran agar membuka kembali Selat Hormuz. Sebaliknya, Teheran sempat menawarkan akses bagi kapal komersial, sebelum kembali menutup jalur itu hingga blokade laut AS dicabut sepenuhnya.

Militer Iran juga meminta pemilik kapal mematuhi arahan otoritas setempat. Mereka bahkan menilai pernyataan Trump mengenai kondisi Selat Hormuz sebagai sesuatu yang "tidak dapat dipercaya".

Sementara itu, upaya internasional mulai digalang. Inggris dan Perancis, bersama perencana militer dari lebih dari 30 negara, menggelar pembicaraan untuk mengamankan jalur pelayaran. Paris dan London menyatakan siap memimpin misi multinasional "segera setelah kondisi memungkinkan". (tin,ist,kum/dya)

PEMERINTAH Iran mulai memetik pemasukan dari kebijakan tarif kapal di Selat Hormuz. Untuk pertama kalinya, pungutan terhadap kapal yang melintas di jalur energi paling vital dunia itu benar-benar direalisasikan, setelah sebelumnya sebatas wacana.

Di saat bersamaan, situasi di Selat Hormuz masih jauh dari stabil. Lalu lintas kapal dibatasi ketat, seiring konflik yang belum mereda di kawasan tersebut.

Mengutip laporan AFP, Wakil Ketua Parlemen Iran, Hamidreza Hajibabaei, memastikan bahwa pemasukan awal sudah diterima negara.

"Pendapatan pertama yang diterima dari tarif Selat Hormuz telah disetorkan ke rekening Bank Sentral,"

TURUNKAN KOLESTEROL DENGAN PARE REBUS

Pare dikenal sebagai sayuran dengan rasa pahit yang khas, ternyata pare menyimpan manfaat luar biasa untuk kesehatan. Salah satunya adalah pare rebus, yang bisa dijadikan alternatif masakan bagi orang yang menjalani terapi kesehatan, termasuk pengobatan kanker, tumor, hingga mereka yang harus menjaga kolesterol dan gula darah.

Sayuran ini kaya akan vitamin, mineral, serta antioksidan yang berperan penting dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan vitamin C pada pare, misalnya, dapat membantu memperkuat sistem imun sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit.

Selain itu, konsumsi pare rebus juga dikaitkan dengan kemampuannya dalam membantu menurunkan kadar kolesterol. Kandungan serat dan senyawa aktif di dalamnya berperan dalam mengurangi kolesterol jahat dalam darah, sehingga turut menjaga kesehatan jantung.

Menjaga imunitas

Kandungan vitamin C dalam pare rebus memiliki peran penting dalam menjaga daya tahan tubuh tetap optimal. Sistem imun yang kuat membuat tubuh tidak mudah terserang penyakit. Selain itu, asupan vitamin ini juga membantu menjaga kesehatan mulut, seperti mencegah sariawan, bibir kering dan pecah-

pecah, hingga gusi berdarah.

Antioksidan alami

Pare mengandung antioksidan yang cukup tinggi, terutama dari kombinasi vitamin C dan folat, yang berperan membantu proses detoksifikasi atau pembuangan racun dalam tubuh. Selain pare, sumber antioksidan lainnya juga dapat ditemukan pada bit, teh hijau, dan jambu biji.

Menurunkan kadar kolestrol

Konsumsi pare rebus secara rutin dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh, terutama jika diimbangi dengan pola makan sehat dan aktivitas fisik yang teratur.

Hal ini berpotensi mencegah gangguan serius seperti penyempitan pembuluh darah, stroke, dan serangan jantung, sehingga kesehatan jantung serta sistem peredaran darah dapat tetap terjaga dengan lebih baik dalam jangka panjang.

Mengurangi kadar gula darah

Pare diketahui mengandung senyawa saponin yang berperan dalam membantu proses metabolisme glukosa, sehingga dapat membantu menurunkan kadar gula darah secara alami. Konsumsi pare secara rutin, terutama jika disertai dengan pola makan sehat dan gaya hidup seimbang, dapat menjadi salah satu upaya pendukung dalam menjaga kestabilan gula darah serta membantu mencegah risiko diabetes sejak dini.

Mengatasi sembelit

Dengan kandungan serat yang cukup

tinggi, pare rebus membantu melancarkan proses pencernaan, mencegah sembelit, dan menjaga kesehatan usus agar tetap berfungsi dengan baik.

Konsumsi secara rutin juga dapat membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan secara keseluruhan serta membuat tubuh terasa lebih nyaman dan ringan.

Cara Mengonsumsi Pare agar Manfaatnya Maksimal

Untuk mendapatkan manfaat pare secara optimal tanpa terganggu rasa pahitnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

Kurangi rasa pahit sebelum diolah, iris pare, lalu lumuri dengan garam dan remas perlahan. Diamkan beberapa menit sebelum dibilas agar rasa pahitnya berkurang.

Konsumsi dalam porsi wajar, meski sehat pare tetap sebaiknya dikonsumsi secukupnya. Porsi berlebihan justru dapat menimbulkan efek samping, seperti gangguan pencernaan.

Padukan dengan bahan lain, agar lebih nikmat pare bisa diolah bersama bahan lain seperti telur, tahu, atau daging tanpa lemak untuk menyeimbangkan rasa.

Pilih cara pengolahan yang tepat, merebus atau mengukus pare menjadi pilihan terbaik

untuk menjaga kandungan nutrisinya tetap terjaga dibandingkan menggoreng.

Konsumsi secara rutin namun tidak berlebihan, mengonsumsi pare secara berkala dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan, asalkan tetap diimbangi dengan pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Perhatikan kondisi kesehatan, bagi penderita penyakit tertentu atau yang sedang menjalani pengobatan, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga medis sebelum mengonsumsi pare secara rutin agar manfaatnya tetap optimal dan tidak menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. (Nabilla - mahasiswa UINSA, berkontribusi dalam tulisan ini).

2 JENIS PARE Populer di Indonesia



Pare Kodok	Pare Gajah
Sangat Pahit	Tidak terlalu Pahit
Hijau Tua	Hijau Muda
Tidak Terlalu berair	Gemuk berair
Bintil bintil lebih kecil dan banyak	Bintil bintil besar mirip benjol an



Penampakan Bulan Tak Pernah Sama, Kenapa?

Perbedaan sudut pandang membuat orientasi bulan dapat berubah cukup drastis, baik antarwilayah maupun sepanjang waktu.

Para ilmuwan mengungkapkan bahwa tampilan bulan tidak selalu sama jika diamati dari berbagai wilayah di Bumi. Perbedaan sudut pandang menyebabkan orientasi bulan dapat tampak berbeda, bahkan berubah cukup signifikan antara satu lokasi dengan lokasi lainnya maupun seiring waktu.

“Cara kita melihat bulan dan bintang sepenuhnya bergantung pada perspektif,” kata Pamela Gay, ilmuwan senior di

Planetary Science Institute, dikutip dari Tempo. Menurut para astronom, perbedaan sudut pandang tersebut tidak hanya menyebabkan tampilan bulan berbeda di setiap wilayah,

tetapi juga membuatnya terlihat seolah berputar sejak terbit hingga terbenam di sejumlah daerah.

Sebagai ilustrasi, saat bulan purnama diamati dari Kutub Utara, kawah Tycho terlihat berada di bagian bawah permukaan bulan. Namun, jika dilihat dari Kutub Selatan, posisi kawah tersebut tampak berada di bagian atas.

Perbedaan orientasi ini juga terjadi di wilayah lintang menengah. Data dari

Lunar and Planetary Institute mencatat bahwa posisi bulan di Wellington, Selandia Baru.

Berbeda sekitar 97,1 derajat berlawanan arah jarum jam dibandingkan dengan yang terlihat dari Los Angeles. Variasi tersebut dipengaruhi oleh perbedaan garis lintang di masing-masing lokasi.

Secara sederhana, pengamat di Belahan Bumi Utara umumnya melihat pola “manusia di bulan” dalam posisi tegak. Sementara itu, di belahan selatan, pola yang sama dapat tampak berbeda dan menyerupai bentuk lain.

“Bulan kini terlihat seperti kelinci yang melompat ke bawah,” ujar Gay menggambarkan perbedaan persepsi tersebut.

Meski demikian, pada dasarnya seluruh wilayah di Bumi mengamati sisi bulan yang sama. Hal ini disebabkan bulan berputar pada porosnya dengan durasi yang sama seperti waktu yang dibutuhkan untuk mengelilingi Bumi, sebuah fenomena yang dikenal sebagai rotasi sinkron.

Perbedaan juga terlihat pada fase bulan antara Belahan Bumi Utara dan Selatan. Di belahan utara, perubahan fase tampak bergerak dari kanan ke kiri, sedangkan di belahan selatan berlangsung sebaliknya.

“Hal ini dipengaruhi oleh susunan bidang cakrawala lokal terhadap posisi Bumi, bulan, dan Matahari,” ujar Catherine Miller, spesialis

observatorium di Mittelman Observatory, Middlebury College. Sementara itu, di wilayah ekuator terjadi fenomena yang lebih khas. Saat bulan terbit, bentuknya tampak berkembang secara vertikal menuju fase purnama, sehingga fase sabit kerap terlihat menyerupai perahu.

Selain itu, di berbagai wilayah, orientasi bulan juga dapat terlihat berubah sepanjang malam. Di daerah ekuator, perubahan ini bahkan bisa mencapai sekitar 180 derajat. “Wajah bulan dapat tampak berputar hingga sekitar 180 derajat dalam satu malam,” ujar Miller.

Namun, fenomena tersebut bukan disebabkan oleh bulan yang benar-benar berputar, melainkan akibat perubahan posisi pengamat saat mengikuti pergerakan bulan di langit. “Semuanya bergantung pada bagaimana bulan bergerak mengikuti lintasan lengkungnya,” kata Gay.

Fenomena “perputaran” ini cenderung berkurang di wilayah lintang tinggi karena bulan tidak melintasi titik tepat di atas kepala (zenit). Akibatnya, perubahan sudut pandang terhadap bulan tidak terlalu terlihat jelas seperti yang terjadi di wilayah dekat khatulistiwa.

Akibatnya, pengamat tidak perlu mengubah posisi secara penuh untuk mengikuti pergerakannya.

Dengan demikian, perbedaan tampilan bulan di berbagai belahan Bumi pada dasarnya dipengaruhi oleh perubahan sudut pandang pengamat sesuai dengan letak geografis masing-masing. (Ella Alfatika-mahasiswa UINSA, berkontribusi dalam tulisan ini)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN “LENTERA TODAY”
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **SIDOARJO:** TEGUH A | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** AIS | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **TRENGGALEK:** HERLAMBANG | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, FADHILA | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Tren Jeans Ergonomis, Tampilan Modis untuk Lansia

Memasuki bulan April tahun 2026, celana jeans tetap mengukuhkan posisinya sebagai item fesyen lintas generasi yang tak lekang oleh waktu. Bagi kelompok lanjut usia (lansia) di atas 60 tahun, pemilihan jeans kini tidak lagi hanya soal mengikuti tren, melainkan bagaimana mengakomodasi perubahan bentuk tubuh tanpa mengorbankan kenyamanan fisik.

Para penata busana profesional menekankan bahwa kunci kepercayaan diri lansia dalam berbusana denim terletak pada pemahaman detail kecil yang mampu memberikan ilusi tubuh lebih proporsional dan jenjang.

Penggunaan model jeans berpotongan pinggang tinggi atau high-waist menjadi rekomendasi utama tahun ini. Penata gaya Elizabeth Kosich menjelaskan bahwa potongan ini jauh lebih efektif dalam menyamarkan area perut sekaligus menciptakan ilusi kaki yang lebih panjang. Berbeda dengan potongan rendah yang dapat membatasi gerak, model high-waist memberikan dukungan ekstra pada area tengah tubuh, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman saat digunakan untuk beraktivitas sepanjang hari di tengah mobilitas perkotaan yang tinggi.

Selain faktor potongan pinggang, posisi dan bentuk kantong belakang menjadi elemen krusial berikutnya yang sering kali terabaikan namun berdampak besar pada estetika. Saku

belakang yang ditempatkan secara tepat dapat menambah volume yang dibutuhkan seiring bertambahnya usia, namun ukurannya tidak boleh terlalu besar atau dijahit terlalu rendah karena dapat merusak proporsi tubuh.

Bagi lansia yang memiliki postur lebih berisi, penggunaan saku dengan posisi sedikit miring terbukti memberikan efek visual yang lebih ramping, sementara perhatian khusus pada saku samping diperlukan agar tidak mengembang keluar dan memberikan kesan pinggul yang lebar.

Pemilihan warna jeans kini bergeser ke arah palet gelap seperti biru tua (deep indigo) atau hitam pekat. Warna-warna ini memiliki efek menyamarkan yang kuat, sehingga mampu menciptakan kesan tampilan yang lebih halus, ramping, dan rapi.

Jeans warna gelap juga menawarkan fleksibilitas tinggi karena mudah dipadukan dengan berbagai atasan, baik untuk acara formal maupun santai. Meskipun warna terang tetap dapat digunakan untuk suasana yang lebih kasual, pemilihan warna gelap di tahun 2026 ini dinilai lebih mampu menonjolkan sisi signature style yang berkelas bagi kaum lansia.

Kenyamanan adalah fondasi utama dari sebuah identitas diri dalam

berpakaiannya. Dengan mengombinasikan potongan high-waist, penempatan saku yang strategis, dan pemilihan warna gelap yang elegan, lansia tidak hanya sekadar memakai celana, tetapi juga merawat citra diri yang tetap segar dan modern.

Tips & Trik Berkesinambungan dalam mengenakan jeans di usia 60+

Pilih Pinggang Ergonomis: Gunakan potongan high-waist dengan fitur hidden elastic. Model ini mendukung punggung bawah, mencegah sesak saat duduk, dan menyamarkan perut secara alami.

Atur Posisi Saku

Pilih saku belakang yang letaknya sedikit lebih tinggi untuk mengangkat proporsi tubuh. Gunakan saku samping tipe flat-front agar area pinggul tidak terlihat lebar.

Gunakan Warna Gelap

Pilih warna deep indigo atau charcoal black karena warna ini

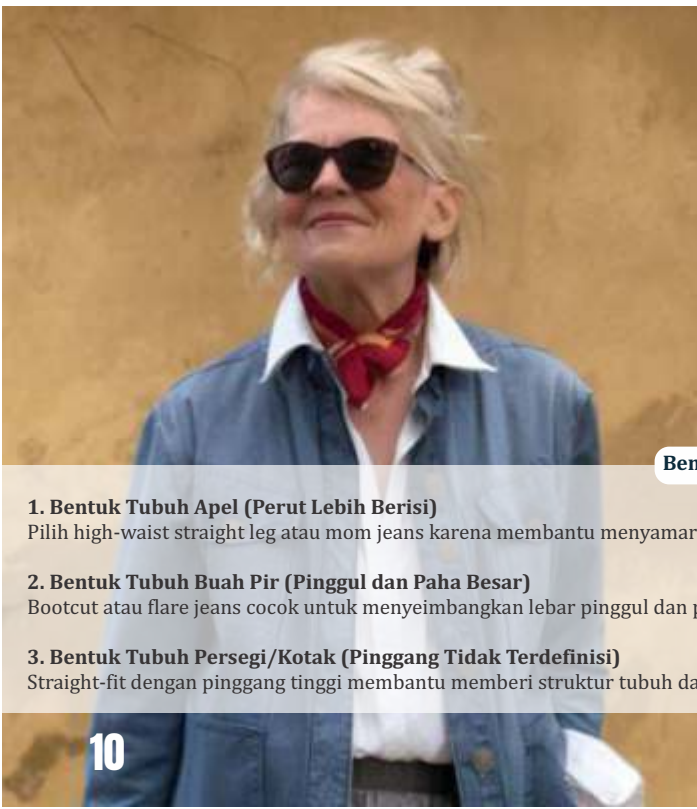
mampu memberikan efek tubuh yang terlihat lebih ramping dan proporsional. Selain itu, tampilannya juga terkesan lebih formal, elegan, dan mewah, sehingga mudah dipadukan dengan berbagai atasan untuk berbagai acara, baik santai maupun semi formal.

Cek Kadar Elastisitas

Pastikan bahan jeans mengandung sekitar 2-4% elastane atau spandex. Kandungan ini sangat penting agar jeans lebih fleksibel dan nyaman mengikuti gerak sendi saat berjalan, duduk, atau beraktivitas sehari-hari, tanpa membuat kain cepat melar atau kehilangan bentuk aslinya.

Keseimbangan Siluet

Padukan jeans berpotongan lurus (straight) dengan atasan yang pas di bahu. Gunakan teknik french tuck (memasukkan bagian depan baju) agar kaki terlihat lebih jenjang. (Natasya -Mahasiswa Uinsa berkontribusi dalam tulisan ini)



Bentuk Tubuh Lansia dan Pilihan Jeans yang Tepat

1. Bentuk Tubuh Apel (Perut Lebih Berisi)

Pilih high-waist straight leg atau mom jeans karena membantu menyamarkan perut dan membuat kaki terlihat lebih panjang. Hindari low-rise, dan pilih bahan dengan sedikit spandeks.

2. Bentuk Tubuh Buah Pir (Pinggul dan Paha Besar)

Bootcut atau flare jeans cocok untuk menyeimbangkan lebar pinggul dan paha agar tubuh terlihat lebih proporsional. Straight cut warna gelap juga bisa memberi kesan kaki lebih ramping.

3. Bentuk Tubuh Persegi/Kotak (Pinggang Tidak Terdefinisi)

Straight-fit dengan pinggang tinggi membantu memberi struktur tubuh dan menciptakan siluet lebih rapi. Model ini juga membuat kaki terlihat lebih panjang tanpa terasa terlalu ketat.

Tatkala Partai Terusik ,...dari hal 1

Usuluan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik kembali mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi merilis hasil kajian tata kelola partai politik yang disusun sepanjang 2025. Melalui Direktorat Monitoring, KPK menyusun sedikitnya 20 kajian strategis, termasuk penilaian risiko korupsi pada sektor politik yang dinilai masih menyimpan sejumlah kerentanan.

Dalam ikhtisar laporan tersebut, dikutip Kamis (23/4/2026) KPK menyebut menemukan “berbagai kerentanan sistemik yang berpotensi membuka ruang korupsi”. Khusus pada partai politik, ada empat persoalan utama yang disorot. Mulai dari belum adanya roadmap pendidikan politik, belum terintegrasinya standar kaderisasi, lemahnya sistem pelaporan keuangan, serta belum jelasnya mekanisme pengawasan dalam Undang-Undang Partai Politik.

Dari temuan itu, KPK merumuskan 16 rekomendasi perbaikan. Salah satu yang paling menonjol adalah pembatasan masa jabatan ketua umum partai maksimal dua periode masa kepengurusan.

Dalam dokumen kajian disebutkan, “Untuk memastikan berjalannya kaderisasi, perlu pengaturan batas kepemimpinan ketua umum partai menjadi maksimal dua kali periode masa kepengurusan.”

Selain soal kepemimpinan, KPK juga mengusulkan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, khususnya Pasal 29. Revisi itu mencakup penambahan sistem kaderisasi berjenjang—muda, madya, dan utama—yang akan menjadi dasar pencalonan dalam pemilu legislatif.

Kader muda diarahkan untuk level DPRD kabupaten/kota, madya untuk DPRD provinsi, dan utama untuk DPR RI.

KPK juga mengusulkan agar pencalonan presiden, wakil presiden, serta kepala daerah harus berasal dari kader partai. Dalam rekomendasi tersebut ditegaskan, “Persyaratan untuk bakal calon presiden/wakil presiden/kepala daerah/wakil kepala daerah selain demokratis dan terbuka, menambahkan klausul yang berasal dari sistem kaderisasi partai; menambahkan persyaratan batas waktu minimal bergabung dalam partai untuk dapat dicalonkan oleh partai.” Masa keanggotaan minimal yang diusulkan adalah dua tahun.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa kajian ini dilatarbelakangi oleh tingginya biaya politik yang berpotensi memicu praktik korupsi. “Temuan dalam

kajian ini menunjukkan kaderisasi partai menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperbaiki,” ujarnya. Ia menambahkan, identifikasi dilakukan pada sejumlah area rawan, termasuk rekrutmen politik dan pembiayaan partai.

KPK juga menekankan bahwa penyusunan rekomendasi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk perwakilan partai politik. “Banyak elemen, termasuk partai politik, turut memberikan saran dalam upaya perbaikan sistem politik di Indonesia,” kata Budi.

Selain aspek kaderisasi dan kepemimpinan, KPK turut menyoroti pengelolaan keuangan partai. Lembaga ini mengusulkan penghapusan sumber sumbangan dari badan usaha atau perusahaan. Dalam kajian disebutkan, “Menghapuskan sumber sumbangan dari badan usaha/perusahaan. Sumbangan yang berasal dari badan

usaha/perusahaan dicatatkan sebagai sumbangan yang berasal dari perseorangan.”

Usulan ini disertai dorongan transparansi laporan keuangan, audit tahunan oleh akuntan publik, serta integrasi sistem pelaporan yang dapat diakses publik.

Rekomendasi lain mencakup kewajiban pelaporan kegiatan pendidikan politik yang didanai negara, lengkap dengan rincian kegiatan, peserta, tujuan, dan output. Kementerian Dalam Negeri juga didorong menyusun kurikulum pendidikan politik serta sistem pelaporan terintegrasi, termasuk untuk kaderisasi partai yang terhubung dengan bantuan keuangan negara (banpol).

Tak hanya itu, KPK mendorong revisi Pasal 46 untuk memperjelas lembaga pengawas dan ruang lingkup pengawasan partai, mencakup keuangan, kaderisasi, hingga pendidikan politik. Penambahan

sanksi bagi partai yang tidak patuh terhadap kewajiban pelaporan juga menjadi bagian dari rekomendasi.

Respons partai politik terhadap usulan ini beragam. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menilai gagasan tersebut melampaui kewenangan KPK dan mencampuri urusan internal partai. Partai NasDem menyebut implementasinya tidak sederhana yang dirumuskan. Partai Golkar menekankan bahwa kualitas demokrasi internal lebih penting dibanding sekadar pembatasan masa jabatan. Sementara Partai Kebangkitan Bangsa melihat usulan kaderisasi sebagai langkah yang dapat memperkuat partai.

Seluruh rekomendasi tersebut, menurut KPK, diharapkan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dan DPR dalam memperbaiki tata kelola partai politik sekaligus memperkuat pencegahan korupsi secara sistemik di sektor politik. (gus,rla,kum,kcm/dya)

Wamendagri: Sepakat Kaderisasi, tapi Batas Jabatan Perlu Dikaji

PEMERINTAH merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait perbaikan tata kelola partai politik dengan nada hati-hati. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyatakan dukungan terhadap penguatan sistem kaderisasi, namun meminta agar wacana pembatasan masa jabatan ketua umum dikaji lebih lanjut.

“Kalau untuk kaderisasi kita sepakat dan semangat 100%. Ya memang kaderisasi harus dibenahi supaya bisa memunculkan pemimpin-pemimpin yang mumpuni, pemimpin-pemimpin yang memiliki kapasitas,” ujar Bima.

Menurut dia, gagasan agar calon pemimpin—termasuk presiden—berasal dari kader partai merupakan harapan yang selama ini juga diinginkan partai politik. “Itu dambaan semua partai politik. Ingin mencetak kadernya menjadi pemimpin di semua tingkatan termasuk tingkat tertinggi yaitu presiden,” katanya.

Namun, ia menekankan bahwa implementasi gagasan tersebut tidak sederhana karena berkaitan dengan berbagai aspek dalam sistem politik. “Itu terkait dengan persoalan pembiayaan, persoalan edukasi, persoalan sistem politik, persoalan sistem pemilu,” ucapnya.

Terkait usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai maksimal dua periode, Bima mengingatkan adanya potensi persoalan hukum yang perlu dipertimbangkan.

“Untuk membatasi jabatan ketua umum ini harus hati-hati. Jangan sampai kemudian nanti digugat lagi di MK. Karena ada di mana pun di seluruh dunia ada pimpinan partai yang menjabat lebih dari dua periode tetapi mampu membangun partai,” ujarnya.

Ia menilai persoalan utama partai politik tidak semata terletak pada lamanya masa jabatan pimpinan, melainkan pada kualitas sistem internalnya. “Persoalannya lebih kepada akuntabilitas dan sistem integritas partai politik,” kata Bima.

Pemerintah, lanjut dia, akan mengkaji seluruh usulan tersebut sebelum diambil keputusan lebih lanjut. Penolakan sejumlah partai politik terhadap usulan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membatasi masa jabatan ketua umum maksimal dua periode dinilai tidak lepas dari faktor kekuasaan internal.

Dekan FISIPOL Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ridho Al-Hamdi, menyebut resistensi tersebut berkaitan dengan posisi elite partai yang selama ini memegang kendali.

“Tentu para CEO atau pemilik-pemilik partai, penguasa-penguasa partai ini merasa gerah. Kenapa mereka menolak atau resisten? Ya karena ini terkait dengan nasib diri mereka, nasib bagaimana mereka menguasai partai dan menguasai republik ini,” ujar Ridho.

Menurut dia, fenomena ini

menunjukkan kecenderungan personalisasi partai politik, di mana organisasi lebih mencerminkan kepentingan figur tertentu dibanding institusi publik.

“Pembatasan itu tujuannya agar modernisasi partai politik terjadi, agar partai politik itu tidak dimiliki oleh personal seperti sebuah perusahaan. Partai politik itu organisasi publik. Sehingga milik semua orang, siapa pun bisa menjadi kader dan ketua umum,” katanya.

Ridho juga menyoroti praktik kepemimpinan jangka panjang di sejumlah partai yang dinilai menghambat regenerasi. Ia menyebut ketergantungan pada figur sentral sebagai indikasi lemahnya sistem kaderisasi.

“Ini yang sering saya dan para ilmuwan internasional sebut sebagai personalisasi partai politik. Bahwa partai politik itu dipersonalisasi pada sosok tertentu yang kalau diganti oleh orang lain itu seolah-olah nggak hidup,” ujarnya.

Lebih jauh, ia mengaitkan dominasi ketua umum dengan potensi pengaruh terhadap lembaga negara. Menurutnya, kekuasaan yang terlalu lama terpusat dapat berdampak pada independensi institusi.

“Ketum-ketum parpol ini berkuasa, dia mempunyai kekuatan kanan-kiri sehingga bisa mempengaruhi netralitas dan independensi lembaga-lembaga negara termasuk salah satunya KPK,” kata Ridho. (wid,ist/dya)

SAAT PAJAK KENDARAAN LISTRIK DIGAGAS, MENDAGRI MINTA DAERAH GRATISKAN

Di tengah munculnya skema baru pajak kendaraan listrik, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian malah meminta pemerintah daerah menggratiskannya. Instruksi itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.13.1/3764/SJ yang dikirim ke seluruh gubernur. Membingungkan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menginstruksikan semua gubernur membebaskan pajak kendaraan listrik. "Percepat Transisi Energi, Mendagri Dorong Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik," demikian judul siaran pers resmi Pusat Penerangan Kemendagri, Kamis (23/4/2026).

Dalam SE tersebut ditegaskan: "Pemberian insentif pembebasan atau pengurangan pajak daerah berupa



PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBNKB KBL (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kendaraan Listrik) berbasis baterai termasuk pada kendaraan bermotor yang dilakukan konversi bahan bakar

fosil menjadi KBL berbasis baterai."

Kebijakan ini disebut sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 dan Permendagri Nomor 11 Tahun 2026. Tujuannya tak berubah yaitu mem-

percepat transisi energi dan mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan, sekaligus merespons tekanan harga energi global.

Namun pembebasan ini bukan tanpa administrasi. Pemerintah daerah tetap diminta menerbitkan keputusan gubernur dan melaporkannya ke Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah paling lambat 31 Mei 2026.

Di level teknis, pajak kendaraan listrik tidak benar-benar dihapus, melainkan dinolkan. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, menegaskan kewajiban administrasi tetap berjalan.

"Setiap pemilik kendaraan listrik tetap mengurus perpanjangan. Pajak tetap diurus, tapi tidak ditagihkan," ujarnya.

Ia menambahkan, "Ini diberi insentif, dibebaskan menjadi nol." Artinya, negara tetap mencatat, tetapi tidak memungut.

Pemerintah pusat juga memberi garis tegas: pajak kendaraan listrik tidak boleh lagi dijadikan target pendapatan daerah. Fokus penerimaan tetap pada kendaraan berbahan bakar fosil.

"Kalau mobil berbahan bakar bensin masih bisa menjadi target pendapatan daerah," kata Benni.

Para produsen memilih menunggu arah pasti dari pemerintah daerah. Sejumlah produsen besar seperti PT Wuling Motors Indonesia, PT Hyundai Motors Indonesia, hingga GAC Aion kompak menyuarakan hal serupa, regulasi yang jelas adalah kunci. Direktur Pemasaran Wuling Motors, Ricky Christian, menyebut pihaknya masih menunggu keputusan konkret dari daerah. "Ya itu kita pahami juga, dan juga rasanya kebanyakan dari pemerintah daerah juga mendukung percepatan elektrifikasi. Tapi kami menunggu keputusan dari masing-masing daerah," ujarnya di Jakarta.

Perubahan skema ini, kata dia, langsung berdampak pada strategi harga. Wuling bahkan sudah menyesuaikan harga produk, termasuk model terbarunya, Exion—yang hadir dalam versi plug-in hybrid (PHEV) dan listrik penuh. (tin,ist,kum/dya)

PERKEMBANGAN KENDARAAN LISTRIK DI INDONESIA

- 2020: Populasi masih sangat kecil, tercatat sekitar 230 unit mobil listrik dan jumlah yang serupa untuk motor listrik.
- 2022: Mengalami pertumbuhan pesat dengan sertifikat registrasi uji tipe (SRUT) mencapai 8.562 unit mobil listrik.
- 2023: Pertumbuhan berlanjut hingga tercatat sekitar 12.248 unit mobil listrik dan puluhan ribu motor listrik.
- 2024: Akumulasi kendaraan listrik diperkirakan mencapai kisaran 140.000 - 160.000 unit (gabungan roda dua dan roda empat).
- 2025: Data per Juni 2025 mencatat total 207.748 unit kendaraan listrik.
- 2026: Hingga Februari 2026, jumlahnya melonjak hingga lebih dari 274.000 u



Ada Kekhawatiran Percepatan Transisi Energi Terhambat

subsidi BBM Rp18,3 triliun per tahun.

Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa mengatakan perubahan dari mandat pajak nol persen menjadi kebijakan yang bergantung pada masing-masing daerah berisiko mengganggu perkembangan pasar kendaraan listrik nasional.

"Insentif pajak nasional harus tetap dipertahankan, bahkan diperluas. Perubahan dari mandat pajak 0% menjadi tarif yang bergantung pada selera fiskal masing-masing gubernur akan merusak paritas harga yang sangat dibutuhkan untuk adopsi massal," ujar Fabby dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (23/4/2026).

IESR menilai keberlanjutan investasi di sektor kendaraan listrik sangat bergantung pada stabilitas regulasi. Inkonsistensi kebijakan dinilai berisiko mendinginkan minat konsumen serta iklim investasi pada manufaktur kendaraan listrik dan infrastruktur pengisian daya, di tengah fase pertumbuhan pasar yang masih awal.

Selain itu, IESR menilai

Permendagri 11/2026 perlu diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Regulasi tersebut sebelumnya memberikan arah kebijakan dengan mengecualikan kendaraan berbasis energi terbarukan dari objek pajak.

"Pasal 7 UU HKPD telah memberikan arah kebijakan yang sangat maju dengan mengecualikan kendaraan berbasis energi terbarukan dari objek pajak. Kami memandang perlunya sinkronisasi agar Permendagri 11/2026 tetap mengacu pada mandat undang-undang tersebut, sehingga status 'Bukan Objek Pajak' bagi kendaraan listrik tetap terjaga," kata Fabby.

IESR meminta pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri, menunda implementasi ketentuan terkait kendaraan listrik, melakukan harmonisasi regulasi, serta memberikan jaminan fiskal permanen bagi sektor kendaraan listrik menuju target 2030. (wid,rls,ktn/dya)

INSTITUTE for Essential Services Reform (IESR) meminta pemerintah meninjau ulang Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 tentang pajak kendaraan bermotor.

IESR menilai perubahan kebijakan tersebut berpotensi menghambat percepatan kendaraan listrik nasional, padahal target pemerintah Indonesia mencapai dua juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik pada 2030 berpotensi menghemat devisa impor hingga Rp49 triliun serta memangkas